



**TINJAUAN KRIMINOLOGI
TERHADAP UPAYA INDONESIA AGAR TETAP BERADA
DI LUAR DAFTAR NON-COOPERATIVE COUNTRIES AND TERRITORIES
(NCCTs)**

TESIS

Oleh:

NURUL ISTIQOMAH CONDROKIRONO

NPM 0706307664

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)
dalam Bidang Kriminologi

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
DEPOK
2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Nurul Istiqomah Condrokirono

NIP : 0706307664

Tanda Tangan :

Tanggal : 16 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nurul Istiqomah Condrokirono
NPM : 0706307664
Program Studi : Kriminologi
Tesis : Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap berada Di Luar Daftar Non-Cooperative Countries and Territories

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Muhammad Mustofa ()

Penguji Ahli : Prof. Hikmahanto Juwana, LL.M., Ph.D ()

Pembimbing : Prof. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D ()

Sekretaris Sidang : Kisnu Widagdo, S. Sos., M.TI ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal 16 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Keluarnya Indonesia dari NCCT list tidak hanya melegakan bagi kita namun juga menimbulkan tantangan dan konsekuensi lebih lanjut dimana apabila kita tidak terus jaga dan tingkatkan akan menjadi titik lemah bagi Indonesia dalam penanganan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang. Kerjasama yang sangat baik diantara instansi terkait dan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam masa monitoring yang ditetapkan oleh FATF guna menghindari masuknya kembali Indonesia ke dalam daftar NCCTs. Pencapaian ini pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Beberapa langkah penting yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam masa monitoring tersebut antara lain : *Pertama*, otoritas pengawas industri jasa keuangan bersama-sama dengan PPATK untuk tetap terus melakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif lainnya termasuk dilaksanakannya audit kepatuhan guna meningkatkan peran serta penyedia jasa keuangan dalam memenuhi kewajiban pelaporannya. *Kedua*, melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip know your customer dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. *Ketiga*, otoritas pengawas lembaga keuangan maupun aparat penegak hukum dan PPATK untuk terus melakukan upaya peningkatan kapasitas guna mengantisipasi perkembangan kejahatan pencucian uang. *Keempat*, merealisasikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk seluruh instansi yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Lemahnya kriminalisasi pencucian uang di Indonesia inilah menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti aspek penguatan kebijakan dan aspek kerjasama internasional sebagai upaya Indonesia agar tetap berada di luar daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs). Hal ini mencakup implementasi kebijakan pencucian uang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memenuhi dan melaksanakan rekomendasi dari FATF sebagai standar internasional.

Jakarta, Desember 2009

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Departemen Kriminologi pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya sebagai peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, maka sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Adrianus Eliasta Meliala Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
2. Pihak PPAK khususnya Bapak Edwin Nurhadi yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Bapak Salahudin, Cahyo, Waliadin yang telah membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan;
4. Seluruh dosen dan staf Departemen Kriminologi yang membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Kedua orang tua, suami dan anakku tercinta yang penuh pengertian dan memberikan dukungan, kalian adalah anugrah terindah yang pernah kumiliki;
6. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kawan-kawan Kriminologi angkatan 2007;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Jakarta, Desember 2009

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Istiqomah Condrokirono
NPM : 0706307664
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap Berada di Luar Daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs).

Beserta perangkat yang ada (jika perlu). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2009

Yang menyatakan

(Nurul Istiqomah Condrokirono)

ABSTRACT

Name : Nurul Istiqomah Condrokirono
Student Number : 0706307664
Study Program : Criminology
Thesis : Criminological Review on the Indonesian Efforts to Remain Outside the List of Non-Cooperative Countries and Territories

This thesis consists of research findings on the aspects of policy reinforcement and international cooperation as parts of Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs. The Indonesian status to be off the list does not only relieve us but also creating further challenges and consequences for which if we do not preserve and improve the status, it will become a weakness point for Indonesia in handling the policies of crime prevention and eradication of money laundering. In this research, the researcher uses a qualitative method of document analysis by the technique of data collection through interviews with source persons.

In this regard, the researcher using the theory from Reuter and Truman which explains that in order to prevent and eradicate money laundering may be conducted by two pillars i.e. prevention and enforcement pillars. The prevention pillar consists of four main pillar namely customer due diligence, reporting, regulation and supervision, and sanction. While the enforcement pillar consists of four main pillars namely predicate crime, investigation, prosecution and punishment, and confiscation.

The prevention pillar functions to prevent the money laundering by applying customer due diligence to financial institution, while enforcement pillar functions when the money laundering has occurred by conducting assets confiscation of money laundering proceeds through international cooperation.

Based on the findings it is found that the Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs using the aspects of policy reinforcement and international cooperation are not maximized. The researcher argues that Indonesia is unwillingly implementing the prevention and eradication of money laundering which can be seen from both aspects and they are implemented fully in accordance with the FATF international standard. If this remains to exist by the Government of Indonesia or does not have special attention, Indonesia must be put on the list of NCCTs.

Keyword : Anti Money Laundering Policy, NCCTs, Prevention and Enforcement of Money Laundering.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1. Upaya Pencegahan Kejahatan Pencucian Uang.....	11
2.1.2. Upaya Pemberantasan Kejahatan pencucian Uang.....	14
2.2 Definisi Konsep.....	15
2.2.1. Pencucian Uang.....	15
2.2.2. NCCTs.....	17
2.2.3. Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang.....	20
2.3 Alur Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	24
3.2. Tipe Penelitian.....	25
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4. Pelaksanaan Penelitian.....	26
3.5. Hambatan Penelitian.....	27
BAB IV STRATEGI NASIONAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG	
4.1. Rekomendasi FATF Sebagai Kerangka Dasar Anti Pencucian Uang.....	28
4.2. Strategi Nasional Pemerintah Indonesia.....	32
4.3. Langkah Pemerintah Dalam Melaksanakan Strategi Nasional.....	48
4.4. Perspektif Kriminologi.....	56

BAB V	ASPEK KERJASAMA INTERNASIONAL DAN ASPEK PENGUATAN KEBIJAKAN DALAM MENCIPTAKAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG	
	5.1. Aspek Kerjasama Internasional.....	60
	5.2. Aspek Penguatan Kebijakan.....	76
BAB VI	ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP ASPEK PENGUATAN KEBIJAKAN DAN ASPEK KERJASAMA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA INDONESIA AGAR TETAP BERADA DI LUAR DAFTAR NCCTs	
	6.1. Pilar <i>Prevention</i> atau Pilar Pencegahan.....	88
	6.1.1 <i>Customer Due Diligence</i>	88
	6.1.2. <i>Reporting</i>	93
	6.1.3. <i>Regulation and Supervision</i>	98
	6.1.4. <i>Sanction</i>	99
	6.2. Pilar <i>Enforcement</i> atau Pilar Pemberantasan.....	100
	6.2.1 <i>Predicate Crime</i>	100
	6.2.2. <i>Investigation</i>	101
	6.2.3. <i>Prosecution and Punishment</i>	103
	6.2.4. <i>Confiscation</i>	105
BAB VII	PENUTUP	
	7.1. Kesimpulan.....	112
	7.2. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Pilar Utama Pencegahan & Pemberantasan Pencucian Uang.....	21
Gambar 2	Alur Berfikir Peneliti.....	22
Gambar 3	Alur Berfikir Peneliti.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel Pertukaran Informasi Inteligen di Bidang Keuangan.....	76
--	----

